

EKSISTENSI KURIKULUM PESANTREN SEBAGAI SUB-SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (KONTEKS KASUS PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO)

Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi^{1*}

Universitas Sunan Giri Surabaya¹

*yusronmaulana@unsuri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi sebuah masalah tentang Kesistensi Kurikulum pesantren. Dan Pesantren adalah lembaga pendidikan yang berorientasi masa depan tentu memiliki tujuan, kurikulum, visi dan misi dalam usaha membentuk bangsa yang lebih beradab. Adapun tujuan yang dicanangkan oleh pesantren yaitu pendidikan yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dan selalu bersifat tafaqub fi 'l-din. Perkembangan pesantren dari pesantren salaf (bandongan dan sorogan) sampai pesantren modern yang sangat pesat hingga saat ini tidaklah lepas dari adanya system pendidikan yang jelas dan kurikulum yang terencana dengan baik. Adapun metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang secara teknis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan disajikan. Hasil dari Penelitian ini adalah tujuan pendidikan mesti ditekankan pada tercapainya keseimbangan hidup yang bahagia dunia akhirat, sebagai pengganti tujuan pendidikan lembaga tradisional sebelumnya yang hanya mementingkan akhirat. Pembaharuan kurikulum pendidikan pesantren dengan standar 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum Dalam arti, peantren tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan modern, dan yang didukung oleh kemampuan penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Lokasi Tempat Penelitian ini di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Keyword : Kurikulum, Pesantren, Pendidikan Nasional

LATAR BELAKANG

Sejak dilancarkannya modernisasi pendidikan Islam dalam dunia muslim, tidak banyak lembaga pendidikan Islam yang mampu untuk bertahan seperti pesantren.¹ Kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum.

Pesantren telah eksis ditengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15) dan sejak awal berdirinya, pesantren telah menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Disamping itu Pesantren juga pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural literacy*) Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi masa depan tentu memiliki tujuan, kurikulum, visi dan misi dalam usaha membentuk bangsa yang lebih beradab. Adapun tujuan yang dicanangkan oleh pesantren yaitu pendidikan yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dan selalu bersifat *tafaqub fi 'l-din*.²

¹ Nurcholish Majid, *Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru*, Cet. III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

² Abdullah Idi, *Pembangunan Kurikulum, Teori Dan Praktek*, Cet. I. (Jakarta: Gaya Media, 1999).

Perkembangan pesantren dari pesantren *salaf* (bandongan dan sorogan) sampai pesantren modern yang sangat pesat hingga saat ini tidaklah lepas dari adanya system pendidikan yang jelas dan kurikulum yang terencana dengan baik. Karena kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, maka perlu adanya perencanaan dalam penerapannya, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, akan sulit untuk mencapai semua tujuan dan sasaran pendidikan yang telah dicita-citakan.

Omar Hamalik, mengungkapkan perlunya pemikiran- pemikiran yang inovatif dalam aspek kurikulum. Mengingat masyarakat yang selalu berubah, maka kurikulum pun akan selalu berubah. Berdasarkan pemahamannya, kurikulum dapat dipandang sebagai kurikulum tradisional dan kurikulum modern. Mengingat pesantren memiliki kemampuan untuk eksis hingga saat ini, maka pesantren tentu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dalam mengolah kurikulum tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan juga wawancara. Selain itu metode pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi seperti buku, jurnal, ensiklopedia, surat-surat, catatan perkuliahan, dan lain sebagainya yang relevan dengan Penelitian ini. Tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data yaitu cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan³ Setelah data direduksi maka data tersebut disajikan dengan jelas sehingga bisa dipahami. Kemudian analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan sehingga menjadi sebuah informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pondok pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut dapat disimak dari uraian sebelumnya bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan bahwa dari segi manajemen dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendekatan keagamaan. Ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti, pasal 30 ayat (1) bahwa:

“Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama”.⁴

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

“Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan menjalankan ajaran agamanya”.⁵

³ Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan* (Harmonia11, 2011).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003*, Cet.II. (Bandung: Fokusmedia, 2003).

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Pesantren* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985).

Pendidikan keagamaan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana yang diatur dalam PP. 55 pasal 26 ayat 2 yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah. Di samping itu pondok pesantren yang tujuannya untuk menciptakan insan yang taqwa serta komponen lainnya sebagai manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan merupakan indikator utama mengenai peran pesantren dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dilihat dari segi kontekstualisasi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pada bab II tentang “Dasar, Fungsi dan Tujuan” di mana UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut, terdiri dari dua pasal yakni pasal 2 dan 3. Dua pasal dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, secara berturut-turut menjelaskan tentang “dasar pendidikan nasional”, yakni UUD 1945, kemudian “fungsi dan tujuan pendidikan nasional” yakni :

“Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa inti utama tujuan pendidikan nasional kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menjadi tujuan pondok pesantren sebagaimana yang dirumuskan Ahmad Farhani, yakni: “Tujuan utama diterapkannya pendidikan Islam adalah untuk mencapai tujuan utama agama Islam itu sendiri. Karena itu, (pendidikan Islam) diharapkan mampu membentuk kepribadian mu'min yang patuh kepada Allah, dan bertakwa kepada-Nya, serta beribadah kepada-Nya dengan baik demi meraih kebahagiaan di akhirat dan kesejahteraan (hidupnya) di dunia.”⁶

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pada bab III adalah “prinsip penyelenggaraan pendidikan” yang terdiri atas enam ayat, di dalamnya termaktub pula tentang kedudukan Pendidikan Agama, yakni pendidikan di pondok pesantren terutama bila dicermati ayat 1 yakni :

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

“Nilai Keagamaan” dalam kutipan tersebut dalam konteks Islam adalah tentu saja dimaksudkan sebagai pendidikan yang berbasis pesantren yang syarat dengan nilai-nilai keislaman. Lebih dari itu, dan bila dianalisis lebih lanjut, tampak bahwa muatan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berkenaan dengan pendidikan keagamaan selalu berfokus pada satu tema yang saling terkait antara satu dengan lainnya.

Naskah-naskah bab selanjutnya dalam UU Sisdiknas adalah tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam yang dijelaskan dalam bab VI, terdiri atas sebelas bagian, khusus pada bagian kesembilan menjelaskan tentang “pendidikan keagamaan” yakni pasal 30 ayat 5. Ini berarti bahwa kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki peran yang urgen dan signifikan sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Dalam upaya pengembangan pondok pesantren, tampaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan dari segi eksternal dan dari segi internal.

Dengan mengembangkan pondok pesantren dari segi internal dan eksternalnya akan memberikan warna dan corak khas dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia, apalagi secara kultural pondok pesantren telah diterima dan ikut serta membentuk dan memberikan peran dalam kehidupan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan

⁶ Ishāq Ahmad Farhān, *Al-Tarbiyah Al-Islāmiyah Bayn Al-Asālah Wa Al-Ma'āsirah*, Cet. II. (Dār al-Furqān, 1983).

keagamaan di Indonesia dianggap banyak memberikan andil dalam perjalanan bangsa dan kenegaraan, baik pada masa kolonial hingga sekarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi lembaga pendidikan pesantren masih dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan bangsa. Akhirnya, warga masih tetap diberikan pilihan untuk menyekolahkan putra putri mereka di lembaga pendidikan yang diinginkan, termasuk pilihannya ke pesantren.

Berdasarkan tingkat konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhannya oleh sistem modern, secara garis besar pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, sebagai berikut:

Pertama adalah *Pondok Pesantren Salafiyah*. Kata *salaf* artinya lama, dahulu atau tradisional. Pondok pesantren *salafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya, pembelajaran dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab, penjenjangan tidak didasarkan pada satu waktu tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu, santri dapat naik jenjang yang mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi, dan seterusnya.⁷

Kedua adalah *Pondok Pesantren Khalafiyah* atau *Ashriyah*. Kata *khalaf* artinya kemudian atau belakang, sedangkan kata *ashriyah* artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren *khalafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK) maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya. Pendekatan klasikal pembelajaran pondok pesantren *khalafiyah* dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan program-program yang didasarkan pada satuan waktu, seperti catur wulan, semester, tahun kelas dan seterusnya. Pada pondok pesantren *khalafiyah*, kata pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.

Ketiga adalah *Pondok Pesantren Campuran* atau *Kombinasi*. Pondok pesantren *salafiyah* dan *khalafiyah* dengan penjelasan di atas adalah *salafiyah* dan *khalafiyah* dalam bentuk yang ekstrim. Namun fakta di lapangan tidak ada atau sedikit sekali pondok pesantren *salafiyah* atau *khalafiyah* dengan pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara dua pengertian di atas. Sebagian pondok pesantren yang mengaku *salafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Kondisi ini juga dijumpai pada pesantren *khalafiyah* yang umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pengajian kitab klasik, karena sistem *ngaji kitab* selama ini diakui sebagai salah satu identitas pondok pesantren. Kondisi ini mengakibatkan kurikulum yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren atau model kombinasi.⁸

B. Dinamika Kurikulum Pesantren

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian kurikulum, akan disinggung terlebih dahulu definisi tentang kurikulum. Menurut Iskandar Wiryokusumo, kurikulum adalah “Program pendidikan yang disediakan sekolah untuk siswa”.⁹ Sementara itu, menurut S. Nasution, kurikulum adalah “Suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses

⁷ Qodri A. Azizy dan Amin Haedari, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

⁸ Ibid, 16

⁹ Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, ed. Bina Aksara (Jakarta, 1988).

belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung-jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya”¹⁰

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang diidamkan. Pesantren dalam kelebagaannya, mulai mengembangkan diri dengan jenis dan corak pendidikannya yang bermacam-macam. Pesantren besar, pesantren Tebuireng Jombang, misalnya, di dalamnya telah berkembang madrasah, sekolah umum, sampai perguruan tinggi yang dalam proses pencapaian tujuan institusional selalu menggunakan kurikulum. Tetapi, pesantren yang mengikuti pola salafi (tradisional), mungkin kurikulum belum dirumuskan secara baik. Kurikulum pesantren “salaf” pelaksanaan kurikulumnya berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Jadi, ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan. Itulah gambaran sekilas isi kurikulum pesantren tentang “salafi”, yang umumnya keilmuan Islam digali dari kitab-kitab klasik, dan pemberian keterampilan yang bersifat pragmatis dan sederhana.

Adapun karakteristik kurikulum yang ada pada pondok pesantren modern, mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Departemen Agama melalui sekolah formal (madrasah). Kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi (sekolah) pada waktu-waktu kuliah. Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk mengkaji ilmu Islam khas pesantren (pengajian kitab klasik).¹¹

Fenomena pesantren sekarang yang mengadopsi pengetahuan umum untuk para santrinya, tetapi masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional.¹²

Kurikulum pendidikan pesantren modern merupakan perpaduan antara pesantren salaf dan sekolah (perguruan tinggi), diharapkan akan mampu memunculkan output pesantren berkualitas yang tercermin dalam sikap aspiratif, progresif dan tidak “ortodoks” sehingga santri bisa secara cepat beradaptasi dalam setiap bentuk perubahan peradaban dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena mereka bukan golongan eksklusif dan memiliki kemampuan yang siap pakai.

Mencermati hal di atas, bentuk pendidikan pesantren yang hanya mendasarkan pada kurikulum “salafi” dan mempunyai ketergantungan yang berlebihan pada Kiai tampaknya merupakan persoalan tersendiri, jika dikaitkan dengan tuntutan perubahan jaman yang senantiasa melaju dengan cepat ini. Bentuk pesantren yang demikian akan mengarah pada pemahaman Islam yang parsial karena Islam hanya dipahami dengan pendekatan normatif semata. Belum lagi output (santri) yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi problematika modern, mereka cenderung mengambil jarak dengan proses perkembangan jaman yang serba cepat ini.

Dalam bentuk kedua, pesantren yang telah mengadopsi kurikulum dan lembaga sekolah, hubungan ideal antara keduanya perlu dikembangkan. Kesadaran dalam mengembangkan bentuk kedua ini, tampaknya mulai tumbuh di kalangan umat Islam. Namun dalam kondisi riil, keberadaan pesantren yang telah mengadopsi kurikulum sekolah (madrasah), ternyata belum

¹⁰ S. Nasution, *Kurikulum Dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1955).

¹¹ Ainurrafiq, *Pesantren Dan Pembaharuan: Arah Dan Implikasi*, Dalam *Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Gramedia W. (Jakarta, 2001).

¹² Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1998).

sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di sana-sini masih banyak terlihat kendala yang dihadapinya sehingga hasilnya pun belum pada taraf memuaskan. Oleh karena itu, upaya untuk merumuskan kembali lembaga yang bercirikan pesantren yang mampu untuk memproduksi siswa (santri) yang benar-benar mempunyai kemampuan profesional serta berakhlak mulia senantiasa perlu dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan.

Dengan kesadaran ini dapat diyakini bahwa integritas pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pendidikan pesantren, sebagaimana tampak dewasa ini, merupakan kecenderungan positif yang diharapkan bisa menepis beberapa kelemahan masing-masing. Bagi pendidikan pesantren, integrasi semacam itu merupakan peluang yang sangat strategis untuk mengembangkan tujuan pendidikan secara lebih aktual dan kontekstual.

2. Pengertian *Hidden Curriculum*

Kurikulum tersembunyi (*the hidden curriculum*) adalah kurikulum yang tidak direncanakan.¹³ Hilda Taba mengatakan bahwa "*curriculum is a plan for learning*", yaitu aktifitas dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum, menurut Nasution, kurikulum sebenarnya mencakup pengalaman yang direncanakan tetapi juga yang tidak direncanakan yang disebut dengan "*hidden curriculum*" seperti, cara anak menjawab, mencontek, sikap terhadap *asatidz* (guru), disiplin dalam belajar, membina mental diri, dan masih banyak hal lainnya. Dalam hal selanjutnya kurikulum dapat dipandang sebagai "*ideal/ real*" curriculum, "*potential/ actual*", dan juga disebut *hidden curriculum*¹⁴.

Ada beberapa macam kurikulum dalam pendidikan di antaranya adalah kurikulum formal, informal, dan non formal. Kurikulum formal mencakup kegiatan di kelas dan bersifat terencana, kemudian, kurikulum non formal terdiri atas aktifitas-aktifitas yang juga direncanakan akan tetapi tidak berkaitan langsung dengan pelajaran akademis dikelas, dan keberadaan kurikulum ini dipandang sebagai pelengkap (*suplement*) kurikulum formal.

Berdasarkan pandangan di atas dapat diambil gambaran bahwa *hidden curriculum* tidak direncanakan oleh sekolah dalam menjalankan berbagai programnya serta tidak ditulis dan dibicarakan oleh para pendidik (*teacher*). Kurikulum ini murni usaha anak didik (santri/murid) dalam mengembangkan potensi dalam dirinya baik yang mampu berkonotasi dengan positif maupun negative. Dalam hal ini murid berperan sebagai perencana dan pelaku yang berhak akan masa depan yang dia inginkan, dengan kata lain murid sebagai penentu keberhasilan dalam hidupnya.

Dalam konteks penerapan kurikulum ini, ada satu lembaga pendidikan yang secara tidak langsung telah menerapkan kurikulum tersebut sejak awal berdirinya hingga saat ini dalam lembaga pendidikan Islam yaitu *Pesantren*. Sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Islam *tulen/asli* yang dimiliki bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan pendidikan agama hingga saat ini masih mampu bertahan ditengah-tengah arus globalisasi dan modernisasi pendidikan. Dalam dunia pesantren terdapat *manhaj* yang lebih memprioritaskan terbentuknya para ulama-ulama masa depan.

C. Pengembangan Kurikulum Pesantren dalam Kebijakan Departemen Agama

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga non formal

¹³ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Cet. IV. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

¹⁴ Idi, *Pembangunan Kurikulum, Teori Dan Praktek*.

Islam, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal.¹⁵

Tentang implementasi Kurikulum 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015, maka MI, MTs dan MA di luar sasaran pendampingan, harus kembali menerapkan kurikulum 2006 atau KTSP untuk mata pelajaran umum dan tetap menerapkan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab, dengan mengacu pada KMA Nomor 165 Tahun 2014. Keputusan ini diambil sejak munculnya surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor: 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang penghentian pelaksanaan kurikulum 2013.

Kurikulum KTSP 2006 itu sendiri berlaku berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi¹⁶ dan Permenag Nomor 2 Tahun 2008 Tentang SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab.¹⁷ Sedangkan implementasi Kurikulum 2013 di Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Untuk menyusun struktur kurikulum kombinasi antara KTSP 2006 untuk mapel umum dan kurikulum 2013 untuk mapel PAI dan Bahasa Arab, maka yang dibutuhkan adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.

Sebagai respon dari bentuk perubahan kurikulum dan kebijakan pemerintah, maka pondok pesantren harus bersedia menggeser orientasi untuk mampu melakukan kolaborasi kurikulum yang selama ini berjalan di lembaganya. Unsur pondok pesantren sendiri meliputi kyai, masjid, santri, pondok atau asrama dan pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning). Kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya.¹⁸ Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi SAW sampai sekarang, yang berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, tempat ibadah, tempat pengadilan, tempat pendidikan dan sebagainya.¹⁹

D. Konteks Pengembangan Kurikulum Pondok Modern Gontor Ponorogo

1. Sekilas Tentang Pondok Modern Gontor

Gagasan melatar belakangi pembentukan pondok modern adalah kesadaran bahwa perlu dilakukan modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, tidak mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan modern Belanda, melainkan dengan modernisasi sistem dan kelembagaan Islam *indigenous* yaitu pesantren.²⁰ Didirikan pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awwal 1345/20 September 1926 oleh tiga bersaudara yang dikenal dengan sebutan "Trimurti", mereka adalah K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fannani, dan K.H. Imam Zarkasyi. Pondok Modern Darussalam Gontor telah memulai proses belajar mengajar sejak tahun 1926.

Berbeda dengan pesantren-pesantren lain yang *getol* mendirikan madrasah sebagai antisipasi globalisasi, Pondok Modern Darussalam Gontor tidak lantas *latah* mendirikan madrasah. Justru

¹⁵Manfred Oepon Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren* (Jakarta: P3M, 1988).

¹⁶Imam Bawani, *Pedoman Dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007).

¹⁷Ibid., 8.

¹⁸Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1983).

¹⁹Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 2001).

²⁰Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

KMI (Kulliyatul Mualimin Al-Islamiah) lah yang dipilih trimurti sebagai jenjang sekaligus pelopor pendidikan modern dengan sistem klasikal. Memang pada waktu itu jelas mengundang kontroversi baik di kalangan pesantren sendiri maupun di tingkat pemerintahan. Namun ternyata KMI Gontor tetap eksis dan bahkan mampu bersaing dengan pendidikan setingkatnya.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Pondok Modern Darussalam Gontor tentu mempunyai kurikulum, namun kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor tidak mengikuti kurikulum pemerintah yang berlaku, bahkan yang lebih mencengangkan lagi, sejak berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor tidak pernah mengikuti ujian nasional.

Bagi Pondok Modern Darussalam Gontor kurikulum tidak terbatas kegiatan di dalam kelas, namun semua kehidupan santri selama 24 jam itulah kurikulum. Tidak berlebihan apabila Pondok Modern Darussalam Gontor berpendapat seperti itu, karena dengan sistem asrama di mana santri selalu berada di asrama selama 24 jam hal itu sangat memungkinkan. Dengan begitu, Pondok Modern Darussalam Gontor secara otomatis telah menggabungkan tri pusat pendidikan, keluarga, masyarakat dan sekolah. Satu sisi jelas pesantren adalah sekolah yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, umum maupun agama. Namun di sisi lain Pondok Modern Darussalam Gontor juga merupakan miniatur masyarakat dan keluarga. Lihatlah betapa kehidupan di pesantren begitu mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia.

Dengan fenomena seperti ini sangat memungkinkan bagi Pondok Modern Darussalam Gontor untuk mentransformasikan ilmu, nilai, akhlak dan moral kepada santri secara maksimal. Dapat dibandingkan dengan sekolah lain (SLTP dan SLTA) yang hanya dapat mengawasi siswanya selama di sekolah. Tulisan ini bertujuan menguak kurikulum tersembunyi Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurut penulis, dengan fungsi pesantren yang bukan hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan tetapi juga nilai, akhlak dan moral kepada santri nampaknya tidaklah cukup apabila kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor hanyalah KMI (Kulliyatul Mualimin Al-Islamiah). Penulis berpendapat masih ada kurikulum lain yang lebih berpengaruh dan lebih berperan terhadap kehidupan santri.

Dalam konteks pondok seperti Pondok Modern Darussalam Gontor kurikulum tersembunyi benar-benar efektif untuk diterapkan. Dan pencapaiannya pun begitu menakjubkan, sehingga bukan saja menelurkan alumni yang pintar dalam intelektual tetapi juga santun dalam bergaul serta sholih dalam beribadah. Dengan kata lain Pondok Modern Darussalam Gontor tidak hanya mencetak intelek yang tahu agama tetapi juga mencetak ulama yang intelek. Sehingga keseimbangan antara IQ, ES dan SQ benar-benar terwujud. Lihat saja dalam penerapan disiplin, santri bukan hanya dihimbau dengan berbagai peraturan yang ada, baik itu tertulis ataupun tidak, namun santri juga ditunjukkan *uswab hasanah* dari para ustadz tentang bagaimana berdisiplin. Berpakaian rapih ketika masuk kelas contohnya, jika disiplin ini hanya ada dalam peraturan tanpa ada *uswab hasanah* dari para ustadz tentu akan sulit menerapkan disiplin tersebut.

Berbagai kegiatan di Pondok Modern Darussalam Gontor syarat akan kurikulum tersembunyi, baik itu kegiatan di kelas maupun kegiatan di luar kelas, di asrama, tempat kursus sampai kegiatan olahraga di lapangan pun mengandung kurikulum tersembunyi.

2. Pondok Sistem Modern sebagai Alternatif

Sebagaimana umumnya kaum modernis yang memberikan kritik terhadap pendidikan pondok pesantren tradisional, Imam Zarkasyi²¹ memandang secara kritis terhadap institusi

²¹ Imam Zarkasyi, *Pedoman Pendidikan Modern. Kursus Agama Islam, Ditulis Bersama Kakaknya, K.H. Zainuddin Fanani*, ed. Amir Hamzah Wiryosukarto, 1996.

pendidikan Islam tertua di tanah air ini. Ia memandang bahwa pesantren memang memiliki kelebihan, tetapi banyak kelemahan yang perlu diperbaharui secara lebih mendasar, dan tidak sekedar bentuk fisiknya saja. Sejumlah kelemahan dimaksud dapat disebutkan sebagai berikut.

Pertama, dalam bidang kurikulum pesantren tradisional hanya mengajarkan pengetahuan agama, sehingga lulusannya tidak dapat memasuki lapangan kerja yang mensyaratkan memiliki pengetahuan umum, penguasaan teknologi dan keterampilan.

Kedua, dalam bidang metodologi pengajaran, pesantren tradisional kurang dapat memberdayakan lulusannya. Para pelajar pesantren tradisional diajari berbagai macam ilmu bahasa Arab dengan susah payah dan sulit dipahami, tapi mereka tidak dapat berbicara dan menulis bahasa Arab dengan baik. Mereka terlihat minder dan kurang memiliki rasa percaya diri.

Ketiga, dalam bidang manajemen. Pesantren tradisional menerapkan sistem manajemen yang sentralistik, tertutup, emosional, dan tidak demokratis. Semua hal yang berkaitan dengan pengaturan pesantren sepenuhnya berada di tangan kiai yang memiliki otoritas penuh sampai ia merasa tidak sanggup lagi, atau meninggal dunia.

Imam Zarkasyi terpanggil untuk mengatasi berbagai kelemahan pendidikan pondok pesantren tersebut, dengan menekankan pada tujuan pendidikan yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik (santri) agar siap dan mampu hidup bermasyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Hal yang demikian antara lain karena pengaruh hadis Nabi Muhammad Saw. Yang sering dikutipnya yaitu hadis yang berbunyi *khair al-nas anfa'uhum li al-nas* (manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang anyak).

Dengan rumusan tersebut, Imam Zarkasyi mengarahkan santrinya bukan untuk memasuki perguruan tinggi tertentu. Melihat keberadaan pesantren yang demikian itu menurut Imam Zarkasyi tidak bisa dibiarkan, melainkan harus diatasi dengan memperbaruinya. Gagasan pembaruan pesantren ini ia lakukan pada pondok modern Gontor Darussalam. Untuk melakukan tugas tugas yang demikian, Imam Zarkasyi melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan studi banding ke berbagai lembaga pendidikan di manca negara.

Dalam kaitan ini ada empat lembaga pendidikan yang dikunjunginya. *Pertama*, Universitas Al- Azhar, Mesir yang terkenal karena usianya yang lebih dari seribu tahun dan sumber dananya yang digali dari wakaf. Al-Azhar sebuah nama yang diambil dari putrid Rasulullah yaitu Fatimah al-Zahra, pada mulanya sebuah masjid sederhana. Namun kemudian dapat hidup ribuan tahun dan telah menghasilkan ulama-ulama ahli agama yang ilmunya amat luas, mendalam dan disegani oleh dunia Islam. *Kedua*, pondok Syanggit yang berada di Afrika Utara, dekat Libya. Lembaga ini dikenal karena kedermawanan dan keikhlasan pengasuhnya. Pondok ini dikelola dengan jiwa yang ikhlas. Pengasuhnya di samping mendidik muridmuridnya, juga menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari. *Ketiga*, Universitas Muslim Aligarh di India yang membekali mahasiswanya dengan pengetahuan umum dan agama sehingga mereka memiliki wawasan yang luas dan menjadi pelopor kebangkitan Islam India. *Keempat*, masih juga di India, yaitu Perguruan Shantiniketan yang didirikan oleh seorang filosof Hindu, Rabendranath Tagore. Perguruan ini terkenal karena kedamaiannya, dan meskipun terletak jauh dari keramaian, tetapi dapat melaksanakan pendidikan dengan baik, bahkan dapat mempengaruhi dunia. Kedamaian yang terdapat di perguruan tersebut mengilhami Darussalam (Kampung Damai) untuk Pondok Pesantren Modern Gontor.²²

Berdasarkan pada hasil pengamatan pada beberapa lembaga pendidikan yang dikunjungi tersebut, Imam Zarkasyi mencoba merancang landasan bagi pengembangan lembaga pendidikan Pondok Modern Gontor Darussalam. Semua masukan tersebut ia padukan pula dengan unsur

²² Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

budaya Indonesia serta dasar-dasar ajaran Islam yang bercorak didirikan *Ablu Sunnah wa al-Jama'ah* yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia. Ide-ide pembaharuan ini ia praktekkan ke dalam pondok yang kemudian disebut Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

3. Tema Pokok Pemikiran KH. Imam Zarkasyi sebagai Pendiri PMD. Gontor Ponorogo

Imam Zarkasyi merupakan seorang pemikir pembaruan pendidikan Islam dan pelaksana ide-ide, di mana pemikiran-pemikiran pembaruannya lebih banyak dituangkan di pondok yang ia asuh. Tetapi ia juga turut memberikan andil di tataran kebijakan-kebijakan pemerintahan utamanya dalam bidang pendidikan, dengan ini juga ia melakukan pembaruan-pembaruan terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Adapun pemikiran pembaharuan pendidikan Islam yang ia tawarkan antara lain tentang pembaharuan di bidang kurikulum pesantren, penguatan di bidang manajemen kelembagaan pesantren, dan penanaman etika pesantren sebagai tradisi²³. Penjelasan sebagai berikut:

a. Pembaharuan Kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Menurut KH. Imam Zarkasyi bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan dan sekaligus amat menentukan bagi kemajuan umat Islam. Untuk itu sejumlah upaya untuk pembaruan sistem pendidikan menjadi salah satu syarat mutlak bagi kemajuan umat Islam. Salah satu problem pesantren di masa lalu baginya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas. Maksudnya, tujuan yang dapat dituangkan dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Pendidikan berjalan hanya mengikuti perkembangan alamiah masing-masing pesantren, dan tidak memiliki tujuan yang spesifik. Untuk itu, ia menawarkan tujuan pendidikan pesantren sebagaimana dalam ungkapan berikut:

“Yang jelas satu saja, yaitu untuk menjadi orang. Jadi masih bersifat umum dan belum menjurus, belum calon doktor, belum calon kusir, belum calon apa-apa. Katakanlah calon manusia. Manusia itu apa kerjanya? Dari pendidikan yang kami berikan itu mereka akan tahu nanti di masyarakat apa yang akan dikerjakan. Jadi persiapan untuk masuk masyarakat dan bukan untuk perguruan tinggi. Maka dari itu, kami namakan pendidikannya, pendidikan kemasyarakatan, dan itu yang kami utamakan” (Abuddin Nata).²⁴

Setelah menyinggung tujuan pendidikan pesantren, Zarkasyi berusaha memperbaharui kurikulum pendidikan pesantren berdasarkan tujuan tersebut. Di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo ia menggagas dan menerapkan kurikulum yang biasa disebut 100% umum dan 100% agama”. Di samping mengajarkan ilmu-ilmu keislaman seperti akidah, tafsir, hadis, fiqih, dan ushul fiqih yang biasa diajarkan di pesantren tradisional, Imam Zarkasyi menambahkan pengetahuan umum, seperti ilmu alam, ilmu hayat, ilmu pasti (berhitung, aljabar dan ilmu ukur), sejarah, tata negara, ilmu bumi, ilmu pendidikan, dan ilmu jiwa. Selain itu ada pula mata pelajaran yang amat ditekankan dan harus menjadi karakteristik lembaga pendidikannya itu, yaitu pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris.²⁵

b. *Mu'adalah* (sistem ijazah PMD. Gontor) Sebagai Bentuk Pembaharuan Pesantren dalam Konstelasi Politik Pendidikan Nasional

Pesantren *Mu'adalah* adalah kelompok pondok pesantren yang ijazahnya mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pemerintah, baik dipandang setara dengan

²³ Zarkasyi, *Pedoman Pendidikan Modern. Kursus Agama Islam, Ditulis Bersama Kakaknya, K.H. Zainuddin Fanani*.

²⁴ Ibid, 208

²⁵ Karen A.Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, n.d.).

SMP/MTs ataupun SMA/MA. Kendati pengakuan tersebut datang sangat terlambat namun *better late than none*, ijazah pondok pesantren tersebut rata-rata telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari perguruan tinggi Islam di luar negeri yang terdapat wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan, seperti Universitas Al-Azhar (Kairo), Universitas di Mekah dan Madinah Saudi Arabia, Pakistan dan India, atau di negara-negara Islam lainnya.²⁶ Bukti yang tidak dapat ditolak adalah banyak alumni dari pesantren Mu'adalah yang melanjutkan studinya ke perguruan-perguruan tinggi yang terdapat di negara-negara tersebut.

Secara historis, kelompok pesantren Mu'adalah bermula dari pengakuan "persamaan" (kesetaraan/ disamakan) dari DIRJEN Pembinaan Keagamaan Agama Islam No. E. IV/ PP.032/ KEP/64 dan 80/ 98 tertanggal 9 Desember 1998 kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Implikasi dari pengakuan tersebut, maka selama kurun waktu tiga tahun (terhitung sejak 1998-2000), kedua pondok pesantren tersebut diperkenankan menyelenggarakan ujian akhir setara EBANAS, yang diberi nama Ujian Ekstranie. Pengakuan terhadap dua pondok pesantren tersebut terus berlanjut berdasarkan Keputusan MENDIKNAS No. 105 dan 106/0/2000 tertanggal 29 Juni 2000. Pada tahun 2005, berdasarkan surat no. 2282/C.C4/ MN/ 2005 tertanggal 3 Mei 2005, jumlah pondok pesantren yang mendapatkan status kesetaraan/disamakan tersebut berjumlah 17 pondok pesantren.²⁷

Saat ini, kelompok pesantren tersebut telah mendirikan organisasi yang diberi nama FKPM (Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah) untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mereka, pasca pemberlakuan UU Sisdiknas yang baru No. 20 tahun 2003, yang baru mengakui pondok pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Pasal 30 ayat 4) dan ditindak lanjuti dengan pendirian direktorat tersendiri di dalam kementerian agama. Hingga makalah ini ditulis, FKPM beranggotakan 32 pondok pesantren, antara lain: KMI Gontor (Ponorogo), KMI Pesantren Baitul Arqom (Jember), KMI Pesantren Darul Qolam (Tangerang), KMI Pesantren Nurul Ikhlas (Tanah Datar-Sumbar), KMI Pesantren Pabelan (Muntilan Mantingan), KMI Pesantren Raudhatul Hasanah (Medan), MHS PP (Ciwaringin), Pesantren Al-Basyariah (Bandung), Pesantren Modern Al-Mizan (Lebak Banten), Pesantren Al-Amien (Prenduan- Sumenep), Pesantren Al-Ikhlas (Kuningan), Pesantren Darul Rahman (Jakarta), Pesantren Darunnajah (Jaksel), Pesantren Mathlabul Ulum (Sumenep), Pesantren Modern Al-Barokah (Nganjuk), Pesantren Ta'mirul Islam (Surakarta), PP Al-Anwar (Jateng), PP Al-Falah (Ploso- Kediri), PP Al-Fithrah (Surabaya), PP Al- Hamidy Dirasatul Mu'allimin (Jatim), PP Darul Munawaroh (NAD), PP Darussalam (Kencong-Kediri), PP Lirboyo Hidayatul Mubtadi'en (Jatim), PP Miftahul Mubtadiin (Nganjuk), PP Nurul Qodim (Probolinggo), PP Mathali'ul Falah (Kajen Pati), PP Salafiyah Syafiyah (Pasuruan), PP Sidogiri Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (Jatim), PP Termas MA Salafiyah (Pacitan), TMI Pesantren Cibatui (Garut), TMI Darul Muttaqien (Bogor) dan TMI Pesantren Darunnajah Cipining (Bogor). Forum yang dipimpin oleh Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. ini secara rutin mengadakan pertemuan antar pondok pesantren dalam menyikapi isu-isu terbaru yang berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren. Pada pertemuan terakhir (tertanggal 3 Juli 2009), FKPM

²⁶ Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren; Agenda Yang Belum Terealisasi* (Jakarta: Taj Publishing, 2008).

²⁷ "WASILAH (Waraqah Sanawiyah Li Akhir Al- Dirosah) TMI (Putra-Putri) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan," in *WASILAH*, n.d.

mengusulkan perlunya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengelolaan dan Status Kelembagaan Pesantren. Usulan tersebut disampaikan karena terdapat temuan tentang indikasi materi peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan temuan lain, berupa keputusan sepihak dari beberapa PTN dalam negeri yang menolak menerima alumni pesantren mu'adalah untuk mengikuti SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) karena tidak ada hasil UN (Ujian Nasional) dalam nilai kelulusan mereka. FKPM memandang penting usulan PMA tentang Pengelolaan dan Status Kelembagaan Pesantren, karena amanat UU. No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 30 ayat 4 menyatakan perbedaan yang tegas antara pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. Dasar hukum lain, seperti PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), juga menyebutkan diktum yang sama, sehingga diharapkan, pesantren mendapatkan pengakuan yang lebih layak dari pemerintah di masa mendatang.

Pada pertemuan tersebut, juga dibahas Permendiknas No. 5 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas No. 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun 2006/2007, yang mestinya tidak mengharuskan pesantren mengikuti UN, sesuai dengan PP. No. 19 Tahun 2005 tentang SNP di atas, kendati tetap mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan berdasarkan rekomendasi BSNP yang telah didapatkan pesantren mu'adalah tersebut.

Dengan terbentuknya FKPM tersebut, tampak bahwa respon dunia pesantren terhadap era reformasi dan modernisasi pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tampak berjalan sejalur dengan pola-pola pembaruan sebagai berikut: a) pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subyeksubyek umum dan vokasional, b) pembaruan metodologi, dengan masuknya sistem klasikal dan penjenjangan, c) pembaruan kelembagaan, seperti pola kepemimpinan pesantren dan tata kelola kelembagaan (yang biasanya berbentuk yayasan), d) pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan Islam (Agama, Moralitas dan Ilmu Pengetahuan) menjadi fungsi sosial-ekonomi.²⁸

Pembaruan kelembagaan seperti yang tertulis juga bisa bermakna pembaruan manajemen yang berkaitan dengan keterhubungan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di dalam pesantren, termasuk juga penataan dan pengelolaan sistem administrasi pesantren yang berpegang teguh pada prinsip manajemen pendidikan.²⁹ Pembaruan kelembagaan yang terjadi di dunia pesantren akhir-akhir ini merubah posisi pesantren dari kepemilikan kiyai secara pribadi menjadi kepemilikan yang bersifat kolektif, termasuk dalam pola kepemimpinannya dari pribadi ke yayasan atau badan hukum tertentu (Pondok Modern Gontor menyebutnya dengan istilah Badan Wakaf). Perubahan seperti ini memudahkan kalangan pesantren dalam menerima bantuan, baik pemerintah maupun LSM (*Non Governmental Organization*) dari dalam ataupun luar negeri yang menaruh perhatian terhadap eksistensi pesantren.³⁰

²⁸ Azyumardi Azra dalam pengantar buku karya Nurcholish Majid, *Bilik Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat, n.d.).

²⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)..

³⁰ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pascakemerdekaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa KH. Imam Zarkasyi (Pendiri PMD. Gontor Ponorogo) adalah salah seorang tokoh pemikir pembaruan pendidikan Islam di Indonesia khususnya dalam bidang pembaharuan pondok pesantren. Menurut tokoh ini, pesantren dalam era modernisasi dan globalisasi masih banyak mempertahankan ketradisionalannya. Sehingga tertinggal dengan pendidikan yang lain.

Melihat kenyataan ini, ia kemudian melakukan pembaharuan kurikulum pesantren, memperkuat manajemen kelembagaan, dan penanaman etika pesantren dalam bingkai kemodernan. Bagi Imam Zarkasyi, tujuan pendidikan mesti ditekankan pada tercapainya keseimbangan hidup yang bahagia dunia akhirat, sebagai pengganti tujuan pendidikan lembaga tradisional sebelumnya yang hanya mementingkan akhirat. Pembaharuan kurikulum pendidikan pesantren dengan standar 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum. Dalam arti, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan modern, dan yang didukung oleh kemampuan penguasaan bahasa Arab dan Inggris.

Dalam bidang manajemen kelembagaan dilakukan pembaharuan utamanya melalui perubahan model kepemimpinan yang lebih terbuka dan bercorak kolektif. Lebih dari itu, untuk menopang kemandirian dan kesinambungan lembaga, dibentuk lembaga wakaf, sehingga keputusan tertinggi ada di lembaga badan wakaf dan semua kekayaan pondok modern Gontor menjadi milik lembaga badan wakaf, dan bukan milik perorangan. Dengan demikian, kelembagaan pesantren bersifat independen, di mana manajemennya diserahkan pada lembaga badan wakaf. Adapun penanaman etika pesantren yang amat ditekankan adalah nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan, keterbukaan, kebersamaan, kemanfaatan diri pada yang lain.

Politik pendidikan bangsa Indonesia-terutama menyangkut perhatian pemerintah dalam memandang pendidikan pesantren barulah berubah sejak era reformasi, termasuk penyusunan produk perundang-undangan yang mengakui dan mendukung eksistensinya. Kendati terlambat dan didahului perguruan tinggi dari luar negeri, *mu'adalah* (pengakuan kesetaraan/disamakan) dari pemerintah. Dan FKPM dapat dipandang sebagai motor penggerak pembaharuan pesantren, terutama di kalangan kelompok pesantren *mu'adalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Steenbrink, Karen. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, n.d.
- Ainurrafiq. *Pesantren Dan Pembaharuan: Arab Dan Implikasi*”, Dalam *Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*. Gramedia W. Jakarta, 2001.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 2001.
- Bawani, Imam. *Pedoman Dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007.
- . *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1998.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1983.

- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pascakemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Djauhari, Mohammad Tidjani. *Masa Depan Pesantren; Agenda Yang Belum terselesaikan*. Jakarta: Taj Publishing, 2008.
- Farhān, Ishāq Ahmad. *Al-Tarbiyah Al-Islāmiyah Bayn Al-Asālah Wa Al-Ma'āsirah*. Cet. II. Dār al-Furqān, 1983.
- Haedari, Qodri A. Azizy dan Amin. *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Idi, Abdullah. *Pembangunan Kurikulum, Teori Dan Praktek*. Cet. I. Jakarta: Gaya Media, 1999.
- Karcher, Manfred Oepon Walfgang. *Dinamika Pesantren*. Jakarta: P3M, 1988.
- Majid, Azyumardi Azra dalam pengantar buku karya Nurcholish. *Bilik Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat, n.d.
- Majid, Nurcholish. *Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mulyadi, Iskandar Wiryokusumo dan Usman. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Edited by Bina Aksara. Jakarta, 1988.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003*. Cet.II. Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Nasution, S. *Kurikulum Dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1955.
- . *Pengembangan Kurikulum*. Cet. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- RI, Departemen Agama. *Pedoman Pembinaan Pesantren*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985.
- Subandi. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Harmonia11, 2011.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zarkasyi, Imam. *Pedoman Pendidikan Modern. Kursus Agama Islam, Ditulis Bersama Kakaknya, K.H. Zainuddin Fanani*. Edited by Amir Hamzah Wiryosukarto, 1996.
- “WASILAH (Waraqah Sanawiyah Li Akhir Al- Dirosah) TMI (Putra-Putri) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.” In *WASILAH*, n.d.